

**ANALISIS PENYEBAB TERBENTUKNYA PERATURAN *ROADMAP VISION 4.000 PEACEKEEPERS 2015-2019* PADA *UNITED NATION PEACEKEEPING OPERATIONS (UNPKO)* DI INDONESIA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

***Ata Seprina***  
**NPM 1516071020**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **Analisis Penyebab Terbentuknya Peraturan *Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers 2015-2019* Pada *United Nations Peacekeeping Operations* (UNPKO) di Indonesia**

**Oleh**

**Ata Seprina**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terbentuknya *Vision 4000 Peacekeepers* yang dijadikan sebagai peta jalan Indonesia dalam komitmen partisipasi pasukan penjaga perdamaian *United Nation Peacekeeping Operation* (UNPKO). Peta jalan tersebut dibentuk dalam sebuah peraturan di Indonesia yang memberikan motivasi terhadap peningkatan jumlah partisipasi pasukan penjaga perdamaian. Namun, hadirnya peta jalan pada tahun 2015-2019 sebagai *counter* bukan sebagai penengah dalam partisipasi perdamaian dunia.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis. Konsep yang digunakan adalah *Decision Making*. Konsep ini menganalisis bagaimana terbentuknya Peraturan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam mengambil sebuah keputusan dimana penyesuaian dibuat sebagai hasil *feedback* dari dunia luar. *Decision making* digabungkan *Rational Actor Model* dalam menganalisis tujuan terbentuknya peraturan tersebut.

Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan bahwa terbentuknya peraturan *Vision 4000 Peacekeepers* di Indonesia didasari oleh faktor internal dan faktor eksternal yang akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam peraturan tersebut. Faktor internal terdiri dari politik domestik. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari hubungan diantara negara-negara dalam sistem internasional dengan negara sebagai sebuah aktor dalam proses pembuatan kebijakan. Faktor-faktor tersebut memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan dibuatnya peraturan *vision 4000 peacekeepers* sebagai peta jalan. Adapun tujuan lainnya yaitu menampilkan citra positif dalam perdamaian dunia.

Kata kunci : *Vision 4000 Peacekeepers, United Nation Peacekeeping Operations, Decision Making, Perdamaian.*

## ABSTRACT

### **Analysis of the Causes for the Establishment of the Roadmap *Vision 4,000 Peacekeepers Regulations 2015-2019* at the *United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO)* in Indonesia**

By

**Ata Seprina**

This research aims to analyze the causes of formation *Vision 4000 Peacekeepers* which is set as Indonesia's roadmap in the commitment to the participation of the *United Nation Peacekeeping Operation (UNPKO)*. Roadmap was formed in a regulation in Indonesia that provides motivation for increasing the number of peacekeepers participating. *The roadmap* in 2015-2019 becomes a counter, not a mediator in world peace participation.

In this research, the researcher uses a qualitative descriptive analysis approach. This concept analyzes how the Indonesian Ministry of Foreign Affairs Regulation was formed in making a decision which was made as a result of feedback from the outside world. Decision making is combined with the Rational Actor Model in analyzing the purpose of the formation of the regulation.

The results of this research describe that the formation of the *Vision 4000 Peacekeepers* regulation in Indonesia was based on internal and external factors that influenced the decision-making process in the regulation. Internal factors consist of domestic politics. Meanwhile, external factors cover the relationship between countries in the international system and the state as an actor in the policy-making process. These factors had a role in the decision-making process of making the *vision 4000 peacekeepers* regulation as a road map. The other purpose was not only to meet the number of troop contributions, but to become a recognized Indonesian TNI peacekeeping training center. The other goals was to display a positive image in world peace.

*Keywords* : Vision 4000 Peacekeepers, UNPKO, Decision Making, Peacekeeping.

**ANALISIS PENYEBAB TERBENTUKNYA PERATURAN ROADMAP  
VISION 4.000 PEACEKEEPERS 2015-2019 PADA UNITED NATION  
PEACEKEEPING OPERATIONS (UNPKO) DI INDONESIA**

Oleh

*Ata Seprina*

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENYEBAB TERBENTUKNYA  
PERATURAN ROADMAP VISION 4.000  
PEACEKEEPERS 2015-2019 PADA UNITED  
NATION PEACEKEEPING OPERATIONS  
(UNPKO) DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: **Ata Seprina**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1516071020**

Jurusan

: **Hubungan Internasional**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

**Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.**

**NIP 19860428 202504 1 004**

**Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A.**

**NIK 231602 880717 201**

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

**Dr. Ari Darmastuti, M.A.**

**NIP 19600416 198603 2 002**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.**



**Sekretaris : Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A.**



**Penguji Utama : Gita Karisma, S.IP., M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
**NIP 19610807 198703 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juni 2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar dan akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 15 Juni 2022

Yang membuat pernyataan

  
  
4B0AJX925268047  
(Ata Seprina)

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Ata Seprina. Lahir di Menyancang pada tanggal 21 Oktober 1998 sebagai anak ketiga dari lima bersaudara pasangan bapak Tambat Ali dan ibu Dahlina. Peneliti menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Menyancang tahun 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pesisir Tengah tahun 2009-2012, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pesisir Barat tahun 2012-2015.

Pada tahun 2015, peneliti berhasil terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dengan konsentrasi studi Ekonomi Internasional. Selama menjadi mahasiswi jurusan hubungan internasional, peneliti sempat aktif dalam kegiatan di jurusan seperti menjadi *Project Protocol in functional of External Relation Business Development* periode 2016-2017. Pada bulan Juli-Agustus 2018, peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karta Sari, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Peneliti juga melakukan kegiatan magang pada Mei 2019-Februari 2020 di PT MICA JAYA PRATAMA (Mineral Botanica). Peneliti juga melakukan pekerjaan purna waktu di Toko SIGERBEAUTY Lampung sejak tahun 2016 hingga saat ini serta melakukan pekerjaan *part time* di berbagai perusahaan retail bidang kecantikan.

## MOTTO

“Jangan khawatirkan bagaimana akhirnya jika bahkan kamu belum memulainya”

(Ooh sehun)

*“Buy less, choose well, and love yourself”*

(Ata, 2022)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran ALLAH SWT.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua orang tuaku, Bapak Tambat Ali dan Ibu Dahlina yang senantiasa mendukung dan mendoakanku dalam setiap langkah hariku.

Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi untuk penulis berproses;

Untuk dosen-dosen yang tanpa lelah berbagi ilmu dan menjadi panutan penulis dalam menghadapi masa depan;

Teman-teman tercinta seperjuangan HI UNILA 2015.

Serta Almamater tercinta,

Jurusan Hubungan Internasional

Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penyebab Terbentuknya Peraturan *Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers 2015-2019* Pada *United Nation\_Peacekeeping Operations* (UNPKO) di Indonesia”

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan Skripsi ini. Peneliti mendapat banyak bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh Karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam kesempatan ini kepada :

1. Allah SWT, atas segala kesempatan, kelancaran, kemudahan, dan Ridho-Nya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A, selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, kesabaran dan motivasi serta saran dalam membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Mba Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A, selaku pembimbing kedua yang telah sabar membimbing, yang tidak pernah lelah mengingatkan. Terimakasih atas segala pengertiannya, motivasi, dan hal-hal baru yang telah diajarkan kepada peneliti. Terimakasih atas segala kesabaran, waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih karena selalu *care* dengan *Ata and the gang*, Mba. Sejak pertama kali ngajar dikelas selalu jadi dosen ter-favorite. Segalak apapun kata orang tapi mba selalu mengajarkan banyak hal baru. Terimakasih atas energi positif, semangat dan kepeduliannya. Maaf sering menyusahkan dalam bimbingan skripsi. Terimakasih selalu mengingatkan untuk kerjain skripsi. Doa terbaik untuk Mba Pit dan keluarga.
6. Mba Gita Kharisma S.IP., MSi, selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, serta motivasi kepada peneliti agar dapat meningkatkan penelitian menjadi lebih baik.
7. Seluruh jajaran Dosen FISIP Universitas Lampung, khususnya Jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, bimbingan dan motivasi kepada peneliti.
8. Kedua orang tua Peneliti, Bapak Tambat Ali dan Ibu Dahlina yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan motivasi kepada peneliti agar dapat menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan dan kasih sayang yang sangat luar biasa. Terimakasih telah berusaha dan tetap ikhlas untuk anakmu yang banyak salah dan belum bisa membanggakan keluarga.
9. Kepada Ami, Abi, Alghani, yang telah memberikan *support*, masukan, serta banyak waktu berharga bagi peneliti. Terimakasih selalu menjadi warna warni dalam keseharian peneliti, terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah.
10. Kakakku tercinta, Meyda Safitri S.Pd dan Dessi Ardila S.E, yang menjadi panutan peneliti sedari kecil. Terimakasih telah mengajarkan banyak hal.
11. Adik-adikku tersayang, Riski Nanda Saputra dan Necha Fivtya. Semangat kuliah dan skripsinya, Ki. Semangat juga mencari cuan agar kaya raya mati

masuk surga. Necha, ayo belajar yang rajin biar bisa masuk kuliah jurusan impian yang sesuai *fashion*-mu. Semangat kalian berdua !!!

12. Ale, Dara, Tria. Terimakasih untuk kebersamaanya dari awal perkuliahan sampai detik ini. Walaupun kita tidak lagi menjadi empat, setidaknya kita telah menjadi satu dalam tujuan masing-masing. Banyak lika-liku perkuliahan yang kita lewati, semoga ada sedikit yang bisa diambil kenangan baiknya. Terimakasih karena telah menjadi tempat berpulang saat ada masalah dalam semasa kuliah. Terimakasih atas canda, tawa, tangis yang telah kita semua lewati. Walaupun pada akhirnya kita tidak bisa lulus bersama, semoga hari-hari semasa perkuliahan menjadi salah satu moment berharga dihidup kalian. Semoga atas segala kegoisan kita mampu membuat kita lebih dewasa kedepannya.
13. Eno, terimakasih untuk semuanya. Atas waktu yang diberikan, semangat dan juga kepedulian kepada peneliti. Terimakasih atas kebaikan dan energi positifnya. Kita memang tidak terikat sejak awal perkuliahan, atau bahkan menjadi asing diawal. Namun, sikap *friendly*-mu yang membuatku menjadikanmu *another home* untuk berpulang disaat ada masalah. Terimakasih karena selalu menjadi pendengar, selalu membagi pengalaman dan banyak arti kehidupan. Terimakasih karena menerimaku ke-*random*-an dalam hidupku. Ayo semangat mengumpulkan pundi-pundi dollar sist.
14. Tata, Tri. Terimakasih selalu bertahan sejak masa masa SMP. Walaupun jarang berkabar, tapi kalian selalu menjadi tempat berbagi kebahagiaan. Terimakasih untuk ketulusannya, tawanya dan semangatnya. Semoga disetiap hari raya, kita masih diberi kesempatan untuk bersama.
15. PT MICA JAYA PRATAMA terkhususnya Mba Feni, terimakasih atas pembelajaran yang diberikan. Terimakasih juga telah memberikan kesempatan untuk menjadi salah satu bagian dari perusahaan.

16. SIGERBEAUTY Crew, terimakasih atas waktunya yang menyenangkan. Terimakasih telah belajar dan berkembang bersama. Terimakasih telah menjadi wadah dalam belajar di kehidupan para pencari kerja. Maaf jika banyak adu argument dan pendapat. Maaf sering kurang teliti. Maaf juga sering telat. Untuk semua orang yang telah, sedang dan akan menetap di sigerbeauty harapanku tetap sama. Semoga selalu kompak dan semangat. Tentunya semangat mencari cuan, *sist*.
17. Kelompok KKN Tiyuh Karta Sari, Tulang Bawang Udik. Terimakasih atas kebersamaannya selama 30 hari.
18. Seluruh Pihak yang membantu dalam kelancaran dan kesuksesan Skripsi Peneliti.

Bandarlampung, 15 Juni 2022

Ata Seprina

1516071020

## DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR GRAFIK .....	vi
DAFTAR SINGKATAN .....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Landasan Konseptual .....	20
2.3 Kerangka Pikir .....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Fokus Penelitian .....	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4 Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	32
4.1 Ruang Lingkup <i>Peacekeeping Operations</i> (PKO) di Indonesia. ....	32
4.1.1 Landasan Hukum Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB ]di Indonesia. ....	36
4.1.2 Cakupan kerja <i>Roadmap Visionn 4.000 Peacekeepers</i> 2015-2019 dalam <i>Peacekeeping Operations</i> .....	38

4.1.3 Keterlibatan Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB .....	47
4.2 Terbentuknya Peraturan <i>Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers</i> Pada <i>United Nation Peacekeeping Operations</i> (UNPKO) di Indonesia .....	49
4.2.1 Faktor Internal yang mempengaruhi <i>Decision Making</i> pada Peraturan <i>Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers</i> di Indonesia.....	50
4.2.2 Faktor Eksternal yang mempengaruhi <i>Decision Making</i> pada Peraturan <i>Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers</i> di Indonesia.....	55
4.3 Analisis Tujuan Peraturan <i>Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers</i> bagi Indonesia. ....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>UN Mission's Summary Detailed By Country</i> Indonesia(Jan 2015).....	6
Tabel 2.1 Rangkuman Hasil <i>Literature Review</i> .....	17
Tabel 4.1 Kontribusi Indonesia Dalam <i>Peacekeeping Operation</i> (2020 - 2021)..	34
Tabel 4.2 Partisipasi Indonesia Dalam UNIFIL Tahun 2015-2019 .....	38
Tabel 4.3 Partisipasi Indonesia Dalam MINUSMA Tahun 2015-2019.....	39
Tabel 4.4 Partisipasi Indonesia Dalam MONUSCO Tahun 2015-2019 .....	40
Tabel 4.5 Partisipasi Indonesia Dalam UNMISS Tahun 2015-2019 .....	40
Tabel 4.6 Partisipasi Indonesia Dalam MINUSCA Tahun 2015-2019.....	41
Tabel 4.7 Partisipasi Indonesia Dalam UNISFA Tahun 2015-2019.....	42
Tabel 4.8 Partisipasi Indonesia Dalam MINURSO Tahun 2015-2019.....	42
Tabel 4.9 Partisipasi Personel Indonesia Dalam UNAMID Tahun 2015-2019....	43
Tabel 4.10 Partisipasi Indonesia Dalam UNMILL Tahun 2015-2019.....	44
Tabel 4.11 Perbandingan Jenis konflik, Mobilitas, Sumber Daya, Medan, dan Tujuan Pasukan <i>Peacekeeping Operations</i> Indonesia.....	45
Tabel 4.12 Keterlibatan Pasukan Konga Dalam Misi Perdamaian Dunia .....	48
Tabel 4.13 Arah Kebijakan Politik Luar Negeri Pemerintahan SBY Dan Jokowi	51
Tabel 4.14 Ringkasan APBN Indonesia Tahun 2012-2019 .....	53
Tabel 4.15 <i>Monthly Summary Of Contributions (Police, Un Military Experts On Mission And Troops)</i> Periode 31 December 2014 .....	57

Tabel 4.16 *UN Mission's Summary Detailed By Country Month Of Report*

31 Desember 2014..... 57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta <i>United Nations Peacekeeping Operations</i> (UNPKO).....	2
Gambar 2.1 Model Pemikiran Penelitian.....	28
Gambar 4.1 Anggaran Militer Indonesia Tahun 2010-2018.....	54
Gambar 4.2 Anggaran Untuk Pertahanan Indonesia 2014-2020 .....	54

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. <i>Rangking Of Contributions By Country</i> UNPKO Desember 2019 .....	7
Grafik 2.1 Faktor Eksternal Dan Faktor Internal Yang Mempengaruhi <i>Decision Making</i> .....	23
Grafik 4.1 Kontribusi Indonesia Dalam <i>Peacekeeping Operations</i> (Periode Feb 2010 – Feb 2014).....	33
Grafik 4.2 Kontribusi Indonesia Dalam <i>Peacekeeping Operations</i> (Periode Feb 2015 – Feb 2019).....	34

## DAFTAR SINGKATAN

ACD	: <i>Asia Cooperation Dialogue</i>
AFISMA	: <i>African Lead Internasional support in Mali</i>
BINUCA	: <i>United Nations Integrated Peacebuilding Office In CAR</i>
CBM	: <i>Confidence-Building Measures</i>
DK PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa
DPKO	: <i>Department of Peacekeeping Operations</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
Konga	: Kontingen Garuda
MISCA	: <i>African-Ied International Support Mission</i>
MINURSO	: <i>The United Nations Mission For The Referendum In Western Sahara</i>
MINUSCA	: <i>Un Multidimensional Integrated Stabilization Mission In CAR</i>
MINUSMA	: <i>The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In Mali</i>
MINUSTAH	: <i>The United Nations Stabilization Mission in Haiti</i>
MPP PBB	: Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa
MONUSCO	: <i>United Nations Organization Stabilization Mission In The Democratic Republic Of Congo</i>

NAASP	: <i>New Asian-African Strategis Partnership</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Permenlu	: Peraturan Kementerian Luar Negeri
PBB	: <i>United Nation Peacekeeping Operations</i>
PKO	: <i>Peacekeeping Operation</i>
PMPP TNI	: Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia
RKD	: <i>Republik Demokratik Kongo</i>
T/PCC	: <i>troop/police contributing countries</i>
UNAMID	: <i>The African Union/United Nations Hybrid Operation in Dulfur</i>
UNDPKO	: <i>United Nation Department of Peacekeeping Operation</i>
UNGA	: <i>United Nations General Assembly</i>
UNIFIL	: <i>United Nations Interim Force In Lebanon</i>
UNISFA	: <i>United Nations Interim Security Force For Abyei</i>
UNMIL	: <i>The United Nations Mission in Liberia</i>
UNMILOBs	: <i>Unarmed Military Observers</i>
UNMISS	: <i>United Nations Mission In The Republic Of Sudan</i>
UNPKO	: <i>United Nation Peacekeeping Operations</i>
UNSMIS	: <i>United Nation Supervision Mission in Suriah</i>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

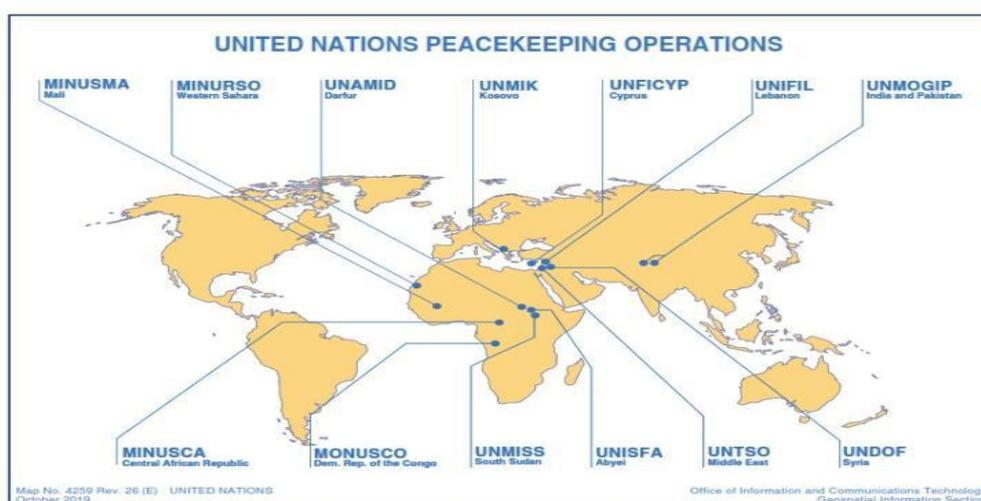
Konflik merupakan sebuah keadaan dimana terjadi perbedaan pendapat atau perdebatan terhadap suatu hal yang biasanya diakhiri dengan perselisihan demi mempertahankan ide masing-masing. Bentuk konflik juga beragam, salah satunya yaitu konflik internasional. Biasanya konflik ini terjadi di dua negara atau lebih yang saling bertentangan dalam memperebutkan kepentingannya. Namun dalam suatu konflik internasional, perselisihan dapat diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga sebagai penengah guna mencegah terjadinya konflik berkelanjutan yang akan menyebabkan peperangan. Pihak ketiga yang bergerak dalam perdamaian dunia salah satunya adalah *United Nation Peacekeeping Operations* (UNPKO) atau Operasi Pemeliharaan Perdamaian milik PBB. UNPKO dikenal sebagai suatu instrumen yang seringkali membantu negara-negara yang berkonflik dengan menciptakan perdamaian-perdamaian di dunia. UNPKO merupakan salah satu cara tradisional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik permasalahan dengan cara-cara damai (*peaceful settlement of dispute*) yaitu dengan cara mediasi, negosiasi maupun dengan cara paksa (*force enforcement*)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Jakarta UN Charter  
[https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta\\_charter\\_bahasa.pdf](https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf). Diakses pada : 18 Desember 2020, Pukul 00.14 WIB

Namun cara paksa hanya dilakukan jika tidak ada jalan keluar lainnya yang lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi. Oleh sebab itu, UNPKO menjadi salah satu operasional paling efektif untuk perdamaian dunia yang bertujuan meminimalisir konflik dan menjadikan negara-negara damai dari peperangan. PBB memiliki 13 *Peacekeeping Operation* (PKO) yang masih beroperasi dalam menyebarkan misi perdamaian dunia hingga tahun 2019<sup>2</sup>. PKO yang beroperasi di dunia menyebar di 4 benua seperti pada peta berikut ini :

**Gambar 1.1 Peta *United Nations Peacekeeping Operations* (UNPKO)**



**Sumber : Map No. 4259 Rev. 26 (E) United Nations Office of Information and Communications Technology Geospatial Information Section October 2019.**

UNPKO merupakan “*flagship enterprise*” yang dibentuk dalam rangka menjaga perdamaian serta keamanan dunia internasional. Pada awalnya, peran MPP PBB hanya sebatas menjaga gencatan senjata yang akan menimbulkan konflik dan menstabilkan keadaan ataupun kondisi dan memberikan wadah dalam penyelesaian konflik-konflik yang terjadi. Namun ketika Perang Dingin berakhir maka tugas militer MPP PBB dikerahkan untuk mendahulukan tugas militer berupa misi yang sebelumnya “tradisional” menjadi “multidimensional”.

<sup>2</sup> Peacekeeping Operations, 2019, United Nations Office of Information and Communications Technology Geospatial Information Section.  
<https://peacekeeping.un.org/en/past-peacekeeping-operations>. Diakses pada : 18 Desember 2020, Pukul 00.20 WIB

Perubahan tersebut menjadi perubahan yang lebih baik dalam melaksanakan kesepakatan damai secara komprehensif dan membantu terciptanya perdamaian yang berkelanjutan dikarenakan semakin melibatkan komponen polisi dan sipil<sup>3</sup>. Seiring berjalannya waktu, kondisi yang dihadapi oleh MPP PBB berubah. Konflik antar negara menjadi konflik mayoritas pada sebelumnya, namun MPP PBB terdapat beberapa konflik juga yang harus diperhatikan yaitu konflik internal ataupun konflik yang melibatkan peperangan antar saudara. Bukan hanya konflik-konflik tersebut, MPP PBB dihadapkan pada beragam konflik yaitu diantaranya adalah “meningkatnya konflik asimetris, ancaman kelompok bersenjata, terorisme dan radikalisme, serta penyakit menular”<sup>4</sup>.

UNPKO merupakan pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian yang dikirim oleh dewan keamanan PBB yang mendapatkan tugas umum yaitu menjaga dan mengawasi proses perdamaian di negara-negara anggota PBB. Untuk mewujudkan perdamaian dunia maka dibutuhkan partisipasi dari berbagai negara dengan melakukan pengiriman pasukannya. Salah satunya adalah Indonesia yang memulai komitmen keterlibatannya sejak tahun 1957 dalam misi UNPKO di Kongo untuk pertama kalinya<sup>5</sup>. Komitmen Indonesia dalam misi perdamaian PBB yang di maksud adalah demi perdamaian dan keamanan dunia yang berlandaskan pada UUD RI 1945 alinea ke 4 yaitu : *"Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia Yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial"*. Komitmen Indonesia seperti yang disebutkan diatas terwujud dengan kontribusi dan partisipasi negara Indonesia yang aktif dalam MPP PBB<sup>6</sup>.

Untuk menjaga perdamaian serta keamanan dunia, partisipasi ialah sebuah indikator yang sangat penting khususnya di ranah internasional. Namun berbeda halnya dengan bagian nasional. Individu maupun organisasi terlibat dalam ranah

---

<sup>3</sup> Ministry Of Foreign Affairs Of The Republic Of Indonesia, 2019, *Indonesia And The United Nations Peacekeeping Mission*

[https://kemlu.go.id/portal/en/read/91/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-and-the-united-nations-peacekeeping-mission](https://kemlu.go.id/portal/en/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-and-the-united-nations-peacekeeping-mission). Diakses pada : 18 Desember 2020, pukul 00.30 WIB

<sup>4</sup> *Indonesia and the united nations peacekeeping mission*, ibid.

<sup>5</sup> Ministry Of Foreign Affairs Of The Republic Of Indonesia, 2019, *Indonesia And The United Nations Peacekeeping Mission*, Jakarta. Ibid

<sup>6</sup> Hutabarat. F Leonard, 2015, *Kerangka Konseptual Kontribusi Pada Pasukan Penjaga Perdamaian Pbb: Studi Kasus Indonesia*. Jurnal Hubungan Internasional Vol 11 no 1

yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan proses profesionalisme dalam berlangsungnya operasi internasional<sup>7</sup>. Dalam hal tersebut, Indonesia secara strategis dan juga ekonomis ikut serta dalam berkontribusi pada misi-misi perdamaian dunia UNPKO salah satunya yaitu dengan berkontribusi dalam menggunakan beberapa produk Indonesia yang digunakan untuk mendorong kemajuan industri strategis nasional khususnya dalam bidang pertahanan.

Produk tersebut salah satunya yaitu : “*Armored Personnel Carrier ANOA* dan senjata api KOMODO, SS dari PT. Pindad, dan seragam TNI/Polri buatan nasional”<sup>8</sup>. Sebagai bentuk keterlibatan maka dibutuhkan peran aktif negara Indonesia. Peran aktif tersebut dilaksanakan guna meningkatkan partisipasi Indonesia. Partisipasi serta kontribusi Indonesia dalam PKO merupakan hal yang menjadi acuan dalam meningkatkan konsistensi untuk mengirimkan personel pasukan dan atas pengawasan PBB. Kemudian pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang keterlibatan Indonesia dalam UNPKO. Kebijakan yang dikeluarkan berupa peta jalan yang diberi nama *Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers tahun 2015-2019*. Peta jalan ini ialah proyek pemerintahan Indonesia dalam keterlibatannya dengan UNPKO. Kebijakan ini dibuat pemerintahan Indonesia sebagai sarana untuk mencapai tujuan yaitu mencapai 4.000 pasukan aktif. Peta jalan pertama kali ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia pada Februari 2015 dalam Peraturan Kementerian Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2015 (Permenlu No.05/2015).

---

<sup>7</sup> Ministry Of Foreign Affairs Of The Republic Of Indonesia, 2019, Indonesia And The United Nations Peacekeeping Mission

[https://kemlu.go.id/portal/en/read/91/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-and-the-united-nations-peacekeeping-mission](https://kemlu.go.id/portal/en/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-and-the-united-nations-peacekeeping-mission). Diakses pada : 18 Desember 2020, pukul 00.30 WIB

<sup>8</sup> Ministry Of Foreign Affairs Of The Republic Of Indonesia, 2019, *Indonesia And The United Nations Peacekeeping Mission*, Jakarta. Ibid

Berdasarkan kebijakan tersebut, keterlibatan Indonesia dalam UNPKO harus dilandaskan pada : “prinsip-prinsip dasar dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang meliputi keterpihakan (*impartiality*), persetujuan para pihak yang bertikai (*consent of the parties*), dan tanpa penggunaan kekerasan kecuali untuk membela diri dan untuk mempertahankan mandat (*non-use of force, except in self-defence and defence of the mandate*)”<sup>9</sup>. Pemerintahan Indonesia terus berupaya agar meningkatkan kontribusi serta keterlibatannya dalam UNPKO termasuk juga melalui proses *vision 4.000 peacekeepers* oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pernyataannya mengenai visi tersebut diungkapkan bahwa beliau berharap bahwa Indonesia menduduki peringkat 10 besar atau biasa disebut (*top ten*) yang berisi negara-negara penyumbang personel pasukan *Troop/Police Contributing Countries (T/PCCS)* di UNPKO. Dengan diterbitkannya peta jalan *vision 4.000 peacekeepers Indonesia* ini, Indonesia berharap dapat meningkatkan dan terus mengembangkan komitmennya terhadap kegiatan PKO di seluruh dunia.

Argumentasi ini didukung oleh bukti pernyataan, "Bahkan kontribusi terkecil sekalipun dapat membuat perbedaan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional". Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam pertemuan mengenai program pemeliharaan perdamaian dengan *UN General Assembly (UNGA)*. Beliau menyampaikan salah satunya bahwa “kontribusi Indonesia dalam UNPKO merupakan suatu hal yang dianggap menjadi peranan yang penting didalam keterlibatan yang berkaitan dengan keamanan serta perdamaian dunia”. Beliau juga menyampaikan bahwa selain kontribusi tersebut ialah sebuah sarana untuk meningkatkan tingkat profesionalisme dalam individu, kontribusi Indonesia tersebut juga dapat mendorong serta membantu memajukan perkembangan industri nasional khususnya dalam hal strategi dan keamanan UNPKO<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Berita Negara Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemeliharaan Perdamaian 2015-2019*, Hal 5.

<sup>10</sup> Berita Negara Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemeliharaan Perdamaian 2015-2019*. Ibid Hal 4

*Vision 4.000 peacekeepers* merupakan kebijakan besar yang telah dibuat Indonesia pertama kali tentang partisipasi dalam UNPKO. Sebelumnya, Indonesia hanya mengirimkan Kontingen Garuda tanpa perencanaan yang detail.

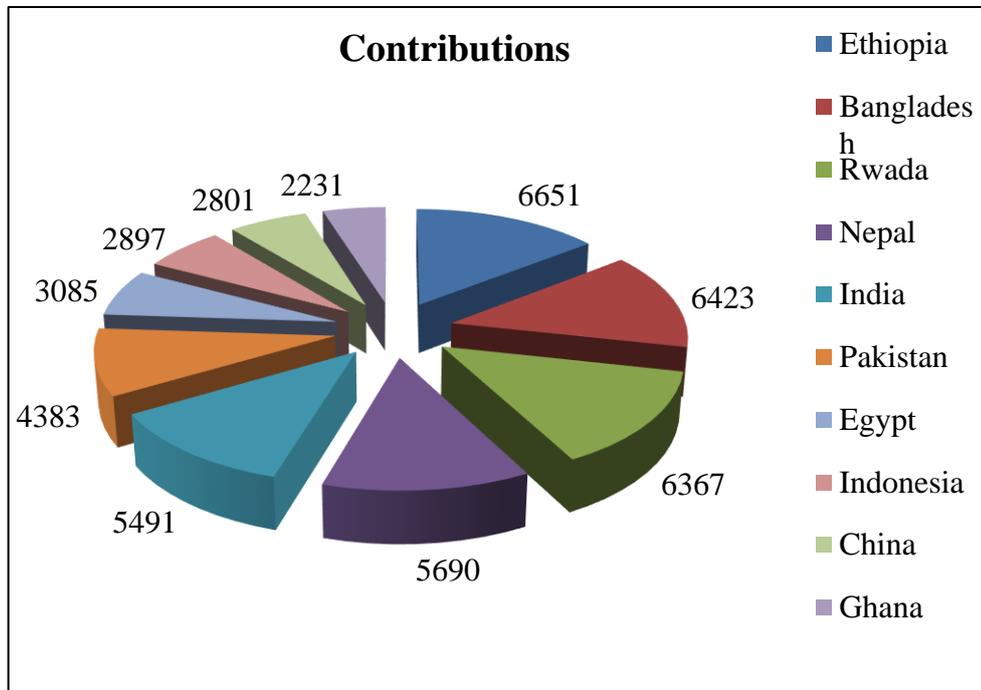
**Tabel 1.1 UN Mission's Summary detailed by Country Indonesia  
(Periode Januari 2015)**

No.	Peacekeeping Operations	Personel
1.	MINURSO	5
2.	MINUSCA	210
3.	MINUSTAH	2
4.	MONUSCO	190
5.	UNAMID	161
6.	UNIFIL	1.289
7.	UNISFA	3
8.	UNMIL	1
9.	UNMISS	20
TOTAL		1.881

**Sumber : [peacekeeping.un.org](http://peacekeeping.un.org)**

Tahun tahun sebelumnya, Indonesia belum memiliki kebijakan luar negeri yang tersusun secara mendetail seperti halnya *roadmap vision 4.000 peacekeepers*. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia sebelumnya tidak konsisten dalam mengirimkan Kontingan Garuda. Pada Januari tahun 2015 tercatat Indonesia hanya berpartisipasi dalam 9 PKO dengan total pasukan 1.881 seperti pada tabel diatas. Namun, pada Desember 2019 yaitu tahun terakhir berlakunya peraturan *vision 4.000 peacekeepers* Indonesia. Partisipasi pasukan Indonesia mengalami kenaikan pesat hingga mencapai peringkat ke 8 dunia seperti pada grafik berikut ini.

**Grafik 1.1. *Rangking of Contributions by Country UNPKO Desember 2019***



Sumber : [peacekeeping.un.org](http://peacekeeping.un.org)

Pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 8 dunia dalam kontribusi UNPKO yaitu mencapai angka 2897 pasukan penjaga perdamaian yang aktif terhitung pada Desember 2019. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia mengalami kenaikan dalam jumlah partisipasi dalam PKO namun tidak mencapai target 4.000 pasukan penjaga perdamaian setelah kebijakan peta jalan *vision 4.000 peacekeepers* Indonesia berlaku. Sebelum ditetapkannya *vision 4.000 peacekeepers* Indonesia sebagai peta jalan, Indonesia telah memiliki partisipasi berupa pasukan volunteer PKO dari DKPBB. Namun, muncul kebijakan *vision 4.000 peacekeepers* sebagai peta jalan, Indonesia yang hadir sebagai *counter* bukan sebagai pelengkap di partisipasi Indonesia dalam PKO. Partisipasi pasukan perdamaian Indonesia dinilai tidak cukup sehingga Indonesia membentuk *Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kementerian Indonesia memiliki tujuan menjadikan RI sebagai (*top ten*) 10 negara kontribusi pasukan pemeliharaan perdamaian terbesar dunia dan berkontribusi secara aktif mengirimkan 4.000 pasukan penjaga perdamaian di PBB. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang bertujuan sebagai peta jalan yang disebut *Vision 4.000 Peacekeepers Indonesia*. Peta jalan tersebut telah ditetapkan pada 13 Februari 2015 oleh seorang Menteri Luar Negeri RI yaitu Retno L.P Marsudi pada periode 2015-2019. Sebelum ditetapkannya *vision 4.000 peacekeepers* sebagai peta jalan, Indonesia telah memiliki partisipasi berupa pasukan volunteer PKO dari DKPBB. Namun munculnya kebijakan tersebut sebagai *roadmap* yang hadir sebagai *counter* bukan sebagai pelengkap dalam PKO. Apakah hal yang ada di *vision 4.000 peacekeepers* Indonesia sehingga partisipasi dalam PKO sebelumnya dianggap tidak terpenuhi. Sehingga atas latar belakang tersebut peneliti mengangkat pertanyaan, yaitu ***"Apakah Penyebab Terbentuknya Peraturan Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers 2015-2019 pada United Nation Peacekeeping Operations (UNPKO) di Indonesia?"***

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini disusun agar menjadi arahan analisis lebih lanjut untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan penelitian dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini antara lain yaitu:

1. Mendeskripsikan Ruang Lingkup *Vision 4.000 Peacekeepers* Indonesia
2. Menganalisis penyebab dan tujuan terbentuknya Peraturan *Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers* tahun 2015-2019 pada *United Nation Peacekeeping Operations* (UNPKO) di Indonesia

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Diakhir penelitian setelah terjawab semua pertanyaan serta tercapai tujuan, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat, yaitu:

##### 1. Secara Akademis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah keilmuan Hubungan Internasional dengan menjelaskan ruang lingkup PKO di Indonesia dan di dunia, penyebab terbentuknya keputusan *Vision 4.000 Peacekeepers* Indonesia sebagai peta jalan, serta tujuan terbentuknya *Vision 4.000 Peacekeepers Operations* Indonesia.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan untuk partisipasi pasukan penjaga perdamaian RI dalam PKO bahwa Peraturan *Vision 4.000 Peacekeepers* Indonesia 2015-2019 sebagai peta jalan tersebut memiliki tujuan untuk mencapai *benefit* lainnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan serangkaian penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya sebagai landasan untuk membangun kerangka pemikiran dengan menggunakan teori perdamaian dan konsep resolusi konflik untuk memetakan kemampuan UNPKO yang merupakan sebuah instrumen yang penting PBB. Penelitian ini melihat beberapa penelitian terdahulu untuk memetakan gambaran teori perdamaian dan konsep resolusi konflik Indonesia dalam UNPKO. Hal ini dinilai penting untuk dilakukan untuk menemukan pembaharuan, perbedaan dan keunikan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, penelitian sebelumnya dapat dijadikan referensi serta menyumbangkan ide gagasan maupun konsep dalam penyelesaian penelitian ini.

**Penelitian pertama** merupakan penelitian karya milik Leonard F. Hutabarat, Ph.D. yang berjudul "*Diplomasi Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB*" tahun 2016. Penelitian ini berawal dari tugas penting PBB serta diplomasi multilateral bagi negara Indonesia yaitu salah satunya adalah adanya peningkatan peran serta inisiatif dalam pengoperasian Pasukan Perdamaian PBB di masa pemerintahan Presiden RI yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang merupakan perwujudan dari kebijakan Indonesia yang kreatif dan dinamis.

Menurut Hutabarat dalam penelitiannya menyebutkan bahwa semakin kompleksnya sebuah misi UNPKO maka akan meningkat pula tugas serta tanggung jawabnya. Namun menurut hutabarat juga bahwa pengawasan gencatan senjata, *buffer zone*, ataupun *demilitarized zone* yang dilakukan dalam UNPKO bukan tugas yang begitu penting untuk meningkatkan rasa percaya tugas penting, justru hal tersebut hanya mendapatkan sedikit perhatian dari pemerintah<sup>11</sup>. Leonard P. Hutabarat mengatakan bahwa PKO telah menjadi bagian penting dari PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia yang telah didukung oleh UNDPKO serta beroperasi sejak tahun 1992 dinyatakan tidak menjamin tugas *UN peacekeepers* tidak memiliki resiko. Penelitian Leonard menyimpulkan bahwa pemerintahan Indonesia seharusnya dapat mengalokasikan sumber daya yang telah dimiliki serta dapat menentukan langkah maupun misi selanjutnya sesuai dengan kepentingan nasional untuk mendapatkan peluang keberhasilan yang lebih jelas<sup>12</sup>. Penelitian ini menggunakan perspektif realis untuk menggambarkan penyelesaian permasalahan serta memenuhi kepentingan nasional negara Indonesia. Leonard juga mengacu pada komitmen RI untuk menjadi *top ten* dalam PKO yang kemudian membentuk *vision 4.000 peacekeepers* Indonesia<sup>13</sup>.

**Penelitian kedua** ditulis oleh Aisha Fauzia Tahun 2018 yang berjudul “*Understanding Motivations behind States’ Participations To the UN Peacekeeping Operations : A Case Study of Indonesia*”. Penelitian ini menerapkan model yang dikemukakan oleh Bellamy dan Williams tentang 5 alasan kenapa sebuah negara memutuskan untuk berpartisipasi dalam PKO yaitu mengenai politik, keamanan, ekonomi, institusi dan normative. Dengan menggunakan *Teory Of Middlle Power*, penelitian ini menjelaskan bahwa suatu negara cenderung lebih banyak berpartisipasi di dalam PKO karena menganggap partisipasi sebagai

---

<sup>11</sup> Hutabarat. F. Leonard. 2016, *Diplomasi Indonesia Dalam Pemeliharaan Perdamaian PBB*, Kementerian Luar Negeri, Jurnal Pertahanan Vol 6 No 2. Ibid hal 76.

<sup>12</sup> Ibid hal 94.

<sup>13</sup> Hutabarat. F. Leonard. 2016, *Diplomasi Indonesia Dalam Pemeliharaan Perdamaian PBB*, Kementerian Luar Negeri, Jurnal Pertahanan Vol 6 No 2. Hal 87

instrumen untuk mempertahankan atau mempercepat prestise<sup>14</sup> dalam politik internasional<sup>15</sup>.

Menurut Aisha, negara mengerahkan personelnya ke UNPKO bila dipandang bermanfaat untuk memajukan kepentingan dan ideologi suatu negara tersebut, hal ini dianggap peneliti signifikan dengan negara Indonesia yang memiliki kasus dan perilaku yang sama sejak tahun 2004<sup>16</sup>. Negara mengerahkan personelnya ke UNPKO dalam rangka memajukan tujuan politik luar negeri sehingga mempercepat perannya dalam kerjasama internasional agar suaranya dapat didengar oleh masyarakat dunia luar. Menurutnya perilaku ini sejalan dengan karakteristik *Middle Power* yang memandang gengsi dan citra positif sebagai hal yang penting dan cenderung terlibat dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan untuk tujuan kemanusiaan. Oleh karena itu, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa status *Middle Power* mempengaruhi negara untuk berpartisipasi dalam UNPKO<sup>17</sup>.

**Penelitian ketiga** merupakan hasil penelitian penelitian Yossy Dwi Apriyanti yang berjudul "*Kebijakan Indonesia Mengeluarkan Roadmap Vision 4000 Peacekeepers 2015-2019 Pada UNPKO (UNITED NATION-PEACEKEEPING OPERATION)* pada tahun 2020"<sup>18</sup>. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa konflik antar negara maupun permasalahan dunia global atau regional akan terus muncul di dunia internasional, maka PBB sebagai organisasi yang hampir memiliki semua anggota di dunia memiliki peran untuk menjaga perdamaian dunia.

---

<sup>14</sup> Prestise menurut KBBI artinya wibawa (pembawa) yang berkenaan dengan prestasi atau kemampuan seseorang  
Lihat pada <https://kbbi.web.id/prestise>

<sup>15</sup> Aisha Fauzia, 2018, *Understanding Motivations behind States' Participations to the UN Peacekeeping Operations : A Case Study of Indonesia*, Master of Science International Relations and Diplomacy. Leident University. Hal 50

<sup>16</sup> Ibid, hal 63

<sup>17</sup> Aisha Fauzia, 2018, *Understanding Motivations behind States' Participations to the UN Peacekeeping Operations : A Case Study of Indonesia*, Master of Science International Relations and Diplomacy. Leident University. Ibid, hal 69

<sup>18</sup> Yossi Dwi Apriyanti, , *Kebijakan Indonesia Mengeluarkan Roadmap Vision 4000 Peacekeepers 2015-2019 Pada UN-PKO (UNITED NATION PEACEKEEPING OPERATION)*, Universitas Riau, 2020.

Menurut Yossy pasukan-pasukan perdamaian dunia dikirimkan ke berbagai negara yang terkena konflik atas perantara UNDPKO (*United Nation Departement Of Peacekeeping Operation*) yang telah disetujui oleh PBB dikarenakan PBB tidak memiliki militer sendiri. Yossy Dwi Apriyanti juga mengatakan bahwa bentuk partisipasi dalam perdamaian dunia bukan hanya mengirimkan pasukan namun beberapa negara bahkan cenderung dominan memilih dukungan secara finansial. Bentuk kontribusi masing-masing memiliki perannya dalam kesuksesan misi *peacekeeping* meski beban terberat diserahkan kepada negara yang mengirimkan pasukan.

Begitupun dengan Indonesia yang telah mengirimkan personelnnya dalam misi perdamaian dunia dengan jumlah besar bahkan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas tidak hanya didasari oleh *UN Chapter* namun di penelitian ini ditemukan faktor yang akan mempengaruhi yaitu berupa internal dan eksternal. Faktor-faktor ini akan menjadi pertimbangan bagi Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan *Roadmap Vision 4000 Peacekeepers 2015-2019*<sup>19</sup>. Telah disimpulkan peneliti bahwa terdapat faktor internal yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan Indonesia yaitu berupa Struktur Pemerintahan, Keamanan dan Atribut Nasional. Faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu Karakteristik dan Struktur dari Sistem Internasional, opini publik yang melatarbelakanginya, serta adanya masalah global dan regional di sektor pribadi<sup>20</sup>.

**Penelitian Keempat** yaitu hasil penelitian dari Ilham Pradana Adinegoro dan kawan kawan pada tahun 2020 dengan judul "*Indonesia's Commitment To The United Nations Peacekeeping Operations In Constructivist Perspective : Case Study Of Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers 2015-2019 Policy*"<sup>21</sup>. Ilham dan kawan kawan mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara yang selalu

---

<sup>19</sup> Yossi Dwi Apriyanti, 2020, *Kebijakan Indonesia Mengeluarkan Roadmap Vision 4000 Peacekeepers 2015-2019 Pada UN-PKO (UNITED NATION PEACEKEEPING OPERATION)*, Universitas Riau. Hal .2

<sup>20</sup> Ibid hal 11

<sup>21</sup> Murwanto, Rosyidin, Susiatiningsih, Paramasatya, 2020, *Indonesia's Commitment To The United Nations Peacekeeping Operations In Constructivist Perspective : Case Study Of Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers 2015-2019 Policy*. Jurnal Pertahanan Vol .6 No. 3. Hal 342-354.

menunjukkan sikap ambisius dalam keterlibatannya sepanjang sejarah di UNPKO. Peraturan yang dijadikan sebagai *roadmap* menurut mereka adalah sebuah strategi polugri Indonesia agar dapat terus aktif dan berpartisipasi pada UNPKO.

Penelitian ini memfokuskan pada analisis kebijakan dengan menggunakan perspektif konstruktivis dengan konsep identitas peran untuk menjelaskan bagaimana Indonesia berperilaku dalam perspektif tersebut. Melalui konsep identitas konstruktivis sebagai teori analisis dijelaskan bahwa Indonesia menjadikan kebijakan *roadmap vision 4000 peacekeepers* sebagai salah satu wujud *peacemaker*. Peran Indonesia sendiri telah diamanatkan secara eksplisit dalam UUD 1945 ayat ke empat yang menunjukkan peran yang harus dimainkan dalam ranah internasional. Tidak hanya dalam konstitusi negara, identitas peran Indonesia sebagai pembawa damai juga didasarkan pada amanat PBB yang tertuang dalam piagam PBB pasal 43 ayat 1.

Hal ini dikorelasikan dengan konsep identitas peran yang melekat dalam suatu negara yaitu negara Indonesia menunjukkan perilaku idealis dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu dengan mengeluarkan kebijakan dalam meningkatkan partisipasi dalam UNPKO. Dengan dinamika internasional yang terjadi, IPSC (*Indonesia Peace And Security Center*) merupakan dasar Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dalam jangka panjang karena partisipasi Indonesia sangat diharapkan oleh dunia internasional. Terbukti bahwa dengan adanya kebijakan *vision 4000 peacekeepers* menjadikan kebijakan Indonesia sebagai contoh bagi negara lain untuk berkontribusi dalam perannya sebagai *peacemaker*<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Murwanto, Rosyidin, Susiatiningsih, Paramasatya, 2020, *Indonesia's Commitment To The United Nations Peacekeeping Operations In Constructivist Perspective : Case Study Of Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers 2015-2019 Policy*. Jurnal Pertahanan Vol .6 No. 3. Ibid hal 352

**Penelitian kelima** yaitu berasal dari penelitian yang berjudul “*Development Of The Indonesian National Army Peacekeeping Mission Center As A Center Of Peacekeeping Training In Southeast Asia*” yang telah diteliti oleh Dylan Pramudya. Penelitian tersebut menjelaskan tentang PMPP TNI yang telah resmi di tahun 2007 dan memiliki tugas yaitu : melakukan dan merencanakan serta menyiapkan pasukan TNI untuk bertugas. Serta Dylan juga menjelaskan bahwa dalam pelatihan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan tugas dari PMPP TNI baik didalam maupun diluar negeri<sup>23</sup>. Dylan menjelaskan bahwa di penelitiannya ditemukan faktor PMPP TNI untuk menjadi *center of peacekeeping training* di ASEAN yaitu diantaranya adalah

- a. Faktor pertama yaitu : memiliki wilayah yang luas agar dapat menampung pasukan-pasukan dalam jumlah yang banyak dalam proses latihan.
- b. Faktor kedua yaitu memiliki fasilitas lengkap yang mendukung merupakan sebuah faktor pendukung yang dianggap dapat dimanfaatkan dalam pemanfaatan wilayah untuk latihan<sup>24</sup>.
- c. Faktor ketiga yaitu anggaran. Dijelaskan bahwa anggaran PMPP TNI telah dianggarkan di setiap tahunnya sehingga memiliki kesiapan kapanpun jika dibutuhkan dalam melaksanakan pelatihan secara berkesinambungan untuk membentuk pasukan yang memiliki kapabilitas.
- d. Faktor keempat yaitu dukungan yang diakui berguna untuk mendapatkan pengakuan dan dapat menjalankan latihan bersama antar *Peacekeeping Center*.
- e. Faktor kelima yaitu kerjasama yang telah dilakukan dengan *Global Peace Operation Initiative* sebagai inisiator pengembangan

---

<sup>23</sup> Dylan Pramudya, 2021, *Development of the Indonesian National Army Peacekeeping Mission Center as a Center Of Peacekeeping Training in Southeast Asia*. Universitas Pertahanan. Volume 7, No 1. Hal 56.

<sup>24</sup> Murwanto, Rosyidin, Susiatiningsih, Paramasatya, 2020, *Indonesia's Commitment To The United Nations Peacekeeping Operations In Constructivist Perspective : Case Study Of Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers 2015-2019 Policy*. Jurnal Pertahanan Vol .6 No. 3. Ibid hal 64.

*peacekeeping center* yang dianggap dapat mengembangkan PMPP TNI dari segi infrastruktur ataupun metode pelatihan.<sup>25</sup>

Faktor-faktor tersebut menurut Dylan mengacu kepada konsep pengembangan *Peacekeeping Center* yang ditulis oleh Brigjen TNI I Gede Sumertha, K.Y yaitu yang kemudian dikemas kedalam 5 poin : *LEADERSHIP, PARTNERSHIP, DOCTRINE, RESOURCE AND SUSTAINABILITY*<sup>26</sup>. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya kuantitas dalam jumlah pelatih dan instruktur PMPP TNI serta faktor kualitas. Kualitas yang dimaksud adalah Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara-negara lainnya yang tergabung dalam operasi perdamaian PBB sehingga terjadi kurangnya pengetahuan dan ketidakmengertian dalam memahami peraturan. Menurut Dylan yang tercantum pada penelitiannya yaitu Indonesia tidak akan mampu memenuhi potensi dan kinerja yang maksimal jika tidak ada dukungan baik dalam pembangunan dalam negeri ataupun dukungan dari politisi dalam setiap *stake holder* yang berjalan di PMPP TNI<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Ibid hal 65.

<sup>26</sup> Ibid hal 57.

<sup>27</sup> Murwanto, Rosyidin, Susiatiningsih, Paramasatya, 2020, *Indonesia's Commitment To The United Nations Peacekeeping Operations In Constructivist Perspective : Case Study Of Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers 2015-2019 Policy*. Jurnal Pertahanan Vol .6 No. 3. Ibid hal 66.

Tabel 2.1 : Rangkuman Hasil *Literature Review*

	Leonard F. Hutabarat, Ph. D.	Aisha Fauzia	Yossy Dwi Apriyanti	Iham Pradana Adinegoro Murwanto <i>et al</i>	Dylan Pramudya
Topik Penelitian	“Diplomasi Indonesia dalam Misi Perdamaian PBB.”	“ <i>Understanding Motivation behind States’ Participations to the UN Peacekeeping Operations : A Case Study of Indonesia.</i> ”	“Kebijakan Indonesia Mengeluarkan <i>Roadmap Vision 4000 Peacekeepers 2015-2019</i> pada UNPKO ( <i>United Nation Peacekeeping Operation</i> ).”	“ <i>Indonesia’s Commitment to the United Nations Peacekeeping Operations in Constructivist Perspective : Case Study of Roadmap Vision 4000 Peacekeepers 2015-2019 Policy.</i> ”	“Pengembangan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia sebagai <i>Center of Peacekeeping Training</i> di Asia Tenggara.”
Fokus Penelitian	“Meneliti babak baru partisipasi Indonesia dalam UN <i>peacekeeping operations</i> ”.	“Motivasi Indonesia dalam meningkatkan partisipasi dalam UNPKO sejak tahun 2014”.	“Harapan Indonesia dalam pengeluaran peraturan <i>roadmap vision 4000 peacekeepers</i> agar lebih aktif dan terus memberikan kontribusi pasukannya dalam misi-misi perdamaian dunia di UNPKO dan terus memberikan dampak yang positif serta terus memberikan kekuatan dalam tugas maupun kontribusinya terutama dalam lingkungan multilateral”.	“Perilaku orang Indonesia dalam menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap pengiriman personel <i>peacekeepers</i> sebelum kebijakan <i>roadmap vision</i> dibentuk”.	“Bagaimana sebuah <i>peacekeeping training center</i> dapat mencapai posisi ideal yang siap untuk ditugaskan pada operasi perdamaian dunia PBB dimanapun berada, serta alasan Indonesia dinyatakan lebih lain daripada negara lainnya di Asia Tenggara”.
Teori & Konsep	Peacekeeping & Realis	Perspektif Multidimensi Bellamy and Williams	Perspektif Non-Realis, Teori Politik Luar Negeri	Konstruktivis	Konsep Pengembangan <i>Peacekeeping Center</i> , Diplomasi Pertahanan

Pendekatan & Metode	Pendekatan Kualitatif	Pendekatan Kualitatif ; Studi Kasus Interpretatif dan Eksplanatori	Metodologi Kualitatif ;	Metode Kualitatif	Metode Penelitian Kualitatif
Temuan	<p>“Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi dalam <i>peacekeeping operations</i> mampu untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Namun, Indonesia terlihat belum mampu memandu sikap dan posisinya dalam permasalahan tersebut. Dengan menetapkan <i>White Paper on Participation in International Peacekeeping Mission</i> menjadi salah satu langkah penting serta faktor yang mampu untuk mengubah Indonesia dalam misi perdamaian dunia”.</p>	<p>“Penelitian ini menemukan 5 aspek yang memotivasi negara untuk berpartisipasi dalam UNPKO yaitu aspek politik, ekonomi, keamanan, kelembagaan dan normatif. Aspek tersebut diteliti berdasarkan hasil dari studi kasus komprehensif di 14 negara bagian yang berbeda.”</p>	<p>“Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia yaitu faktor internal yang terdiri dari struktur pemerintah, keamanan dan atribut nasional. Serta faktor eksternal yaitu karakteristik dan struktur dari sistem internasional, opini publik yang melatarbelakangi dan adanya masalah global &amp; regional di sektor privat”.</p>	<p>“Penelitian ini menemukan alasan bahwa <i>roadmap vision 4000 peacekeepers</i> yang tekah disusun merupakan bentuk strategi Politik Luar Negeri Indonesia dan merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia. Serta melalui konsep identitas konstruktivis sebagai teori analisis ditemukan bahwa roadmap tersebut adalah perwujudan peran Indonesia sebagai <i>peacemakers</i>”.</p>	<p>“Penelitian ini menemukan beberapa poin tentang bagaimana sebuah <i>peacekeeping training center</i> mencapai posisi ideal yaitu dengan <i>leadership, partnership, doktrin, resource and sustainability</i>. Namun, terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat yang berimbas kepada kesiapan PPMP TNI (pusat misi pemeliharaan perdamaian tentara nasional Indonesia) menjadi <i>center of peacekeeping training</i>.”</p>

Sumber : Hasil Olah Data Peneliti

Dalam penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu memberikan berbagai penjelasan mengenai metode maupun konsep yang beragam. Beberapa peneliti terdahulu juga memberikan gambaran baru mengenai penelitiannya yang dapat bermanfaat bagi peneliti seperti motivasi ataupun alasan kenapa Indonesia berpartisipasi dalam UNPKO. Hal tersebut menjadi acuan bagi peneliti dalam penelitian ini untuk membangun kerangka berpikir bahwa Indonesia memiliki penyebab ditetapkannya *vision 4.000 peacekeepers* sebagai peta jalan, Indonesia padahal sebelumnya Indonesia telah memiliki partisipasi berupa pasukan volunteer PKO dari DKPBB dan aktif berpartisipasi didalam segi keamanan dan perdamaian keamanan sehingga terus berkontribusi dalam misi pertahanan dunia.

Penelitian-penelitian yang terdahulu juga memberikan informasi dan pengetahuan terbaru bagi peneliti serta peneliti dapat membentuk sebuah kerangka konseptual penelitian dengan konsep *decision making*. Dalam penelitian ini, untuk menentukan serta membangun kerangka analisis maka peneliti menggunakan konsep tersebut sehingga peneliti menemukan perbedaan yang mendasar mengenai penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terdapat pada sebelum ditetapkannya *vision 4.000 peacekeepers* sebagai peta jalan, Indonesia telah memiliki partisipasi berupa pasukan volunteer PKO dari DK PBB. Namun, muncul kebijakan *vision 4.000 peacekeepers* sebagai peta jalan, Indonesia sebagai *counter* bukan sebagai pelengkap dalam partisipasi PKO.

Peta jalan tersebut telah ditetapkan pada 13 Februari 2015 oleh Menteri Luar Negeri RI yaitu Retno L.P Marsudi pada periode tahun 2015-2019. Namun, tujuan misi tersebut akhirnya tidak terpenuhi dan tercatat bahwa pada akhir periode berlakunya kebijakan tercatat yaitu pada Desember 2019 hanya mencapai 2.897 personel pasukan penjaga perdamaian.

## 2.2 Landasan Konseptual

Dalam penelitian terdahulu yang diuraikan sebelumnya. Peneliti telah dibantu dalam menguraikan kerangka konseptual dalam penelitian ini. Dalam beberapa penelitian yang telah dipaparkan, peneliti menganggap bahwa konsep *Decision Making Process* relevan digunakan untuk melihat fenomena Indonesia yang sangat antusias dalam mengirimkan partisipasi personelnnya pada misi perdamaian dunia khususna dalam PKO untuk memberikan jawaban dari pertanyaan penelitian mengenai penyebab terbentuknya kebijakan *vision 4.000 peacekeepers Indonesia* sebagai peta jalan.

### 2.2.1 Decision Making

*Decision making* atau disebut juga dengan proses pengambilan keputusan merupakan proses pengarahan dimana penyesuaian dibuat sebagai hasil *feedback* dari dunia luar. Keputusan dilakukan dengan tindakan yang diambil untuk mengubah dunia dan kemudian informasi yang diperoleh dari dunia dipantau untuk mengevaluasi efek dari tindakan keputusan tersebut<sup>28</sup>. *Decision making* pertama kali muncul sejak tahun 1950an di negara Amerika Serikat. Aktor utamanya adalah Herbert A. Simon yang merupakan aktor pertama kali yang menggunakan konsep *decision making* dalam buku yang berjudul “*Administrative Behavior: A Study of Decision Making Process In Administrative Organization.*” Menurut Herbert A. Simon, terdapat *administrative behavior* yang memiliki 4 cakupan ilmu yaitu *decision making, agenda setting, choice architecture, dan the development of expertise*. *Decision making* (pengambilan keputusan) merupakan jantung administrasi dimana konsep administrasi harus diturunkan langsung dari logika dan psikologi pilihan manusia<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Stein, Janice Gross. Psychological Explanations of International Conflict. In Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, and Beth A. Simmons. *Handbook of International Relations (Revisited)*. Palgrave, 2002. Hal 292–308

<sup>29</sup> Simon, Herbert A. *Administrative Behavior : A Study Of Decision Making Processes In Administrative Organization*. The Oxford Handbook Of Classics In Public Policy And Administration. Hal 2-11. Dalam *Oxford Handbooks Online* (Www.Oxfordhandbooks.Com). Oxford University Press, 2018. All Rights Reserved. Under The Terms Of The Licence Agreement,

Aktor internasional lainnya juga memiliki pendapatnya masing-masing, salah satunya adalah menurut Robert Jervis mengemukakan bahwa “terkadang sifat egois dalam menginterpretasikan keputusan seseorang yang memiliki pendapat dalam mengambil keputusan merupakan respon dari beberapa keadaan objektif yang memiliki kondisinya tersendiri”. Dalam kondisi lingkungan internal, keputusan akan dibuat ketika para pembuat keputusan sudah mempertimbangkan secara matang keputusannya dan keputusan tersebut harus termasuk kedalam sistem politik yang berlaku di negara tersebut<sup>30</sup>.

*Decision Making* dalam HI berusaha fokus pada aspek-aspek pengambilan keputusan untuk analisis kebijakan negara bangsa. Subyek penyelidikan dalam konsep ini terutama berkaitan dengan isu-isu seperti, bagaimana dan mengapa elit pengusaha negara berperilaku dengan cara tertentu dalam hubungan internasional. Salah satu asumsi utama dalam konsep ini menyatakan bahwa tindakan politik mengikuti cara yang diinginkan oleh pembuat keputusan sebagai aktor. Oleh karena itu, “*why*” dan “*how*” dari suatu tindakan politik dan alasan dibaliknya adalah bidang studi yang disukai dalam teori pengambilan keputusan. Menurut aktor lainnya yaitu *Richard C. Snyder, H.W. Bruck dan Burton Sapin* berpendapat bahwa ranah hubungan internasional suatu negara akan diketahui melalui sebuah proses pembuatan keputusan yang disebut proses *decision making*. Dalam proses *Decision making*, pengambilan keputusan juga harus dipertimbangkan. Salah satunya yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal dimana hal tersebut akan mempengaruhi dan dijadikan alasan terbentuk kebijakan luar negeri sebuah negara.

Teori *decision making* dalam HI terutama berfokus pada keputusan kebijakan luar negeri negara dan aturan di mana keputusan tersebut dibuat. *Setting* dan latar belakang ini memiliki dua sisi yaitu: Eksternal Dan Internal. Pengaruh Internal mencakup hubungan dalam masyarakat dengan negaranya. Sedangkan pengaruh Eksternal menekankan kepada struktur dalam Kawasan internasional seperti hubungan suatu negara dengan negara lainnya serta situasi di dunia internasional<sup>31</sup>.

Menurut Paulus Kurniawan, *Decision Making* atau pengambilan keputusan dari sisi internal yaitu aturan dalam masyarakat yang diorganisasikan serta berfungsi di lingkungan tersebut. Paulus mengatakan bahwa salah satunya seperti politik domestic. Sedangkan sisi eksternalnya yaitu aksi dan reaksi dari negara lain serta campur tangan dari organisasi internasional maupun regional<sup>32</sup>. Kafarneh menjelaskan tentang faktor eksternal adalah politik domestik yang akan berfokus pada bagaimana kondisi serta keadaan yang terjadi di suatu negara. Politik domestic dalam hal ini akan menjelaskan arah kebijakan Indonesia dalam proses pengambilan keputusan peraturan *vision 4000 peacekeepers*. Dalam hal ini, peneliti akan membandingkan dalam era pemerintahan presiden SBY dan Jokowi dimana di era tersebut *roadmap* terencana dan terbentuk. Dalam dua era kepemimpinan yang berbeda tentunya memiliki arah kebijakan yang berbeda, peneliti juga membandingkan dana APBN Indonesia dari total keseluruhan untuk biaya PKO Indonesia.

Dalam penelitian ini, sisi eksternal yang berkaitan dengan keadaan yang terdapat di luar negara luar kawasan yang memberikan respon terutama dari negara-negara lainnya. Dalam proses pembuatan keputusan, faktor eksternal akan menghubungkan aktor dalam proses pembuatan kebijakan.

---

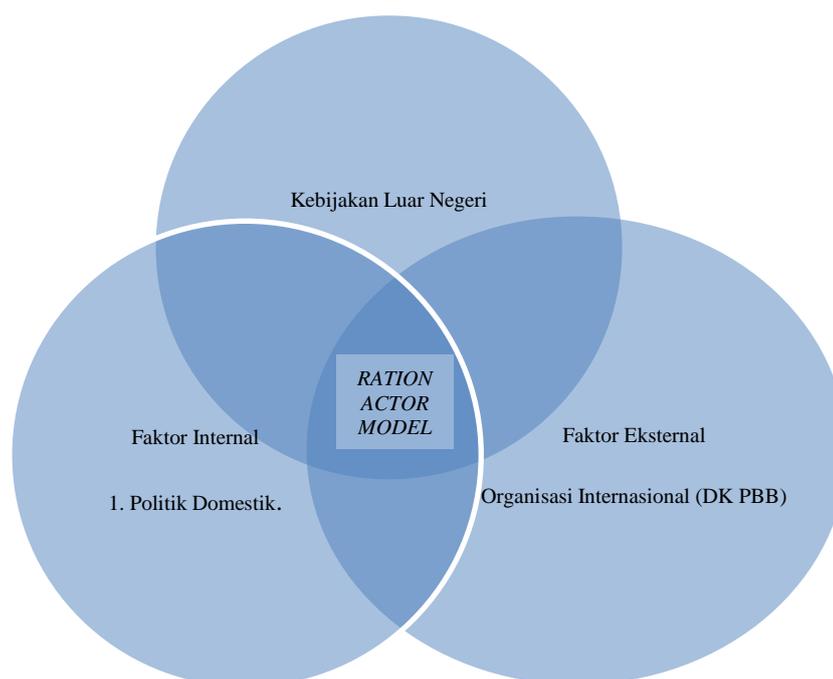
<sup>31</sup> Snyder, R., H. W. Bruck and B. Sapin. 1954. *Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics*. Princeton: Princeton University Press. Dalam tulisan Aneek Chatterjee. *International Relations Today Concepts And Applications* . Department Of Political Science Presidency Collage, Kolkata. Delhi Chennai Chandigarh. Hal 81- 83.

Diakses pada : 22 November 2021, Pukul 23.05 WIB

<sup>32</sup> Paulus. Kurniawan, Made Kembar Sri Budhi. 2017, *Smart Leadership Being A Decision Maker #2 Hal-Hal Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Seorang Pemimpin Dalam Mengambil Keputusan*. Yogyakarta. Penerbit Andi. Hal 1121

Menurut hubungan diantara negara-negara dalam sistem internasional dengan negara sebagai sebuah peneliti tindakan yang dilakukan oleh sebuah negara diatur oleh kepentingan nasional. Kafarneh mengatakan bahwa “dalam sistem internasional, adanya hubungan negara-negara lain hingga organisasi internasional yang dapat menetapkan negara pada jenjang analisis internasional”<sup>33</sup>. Hadirnya organisasi-organisasi dalam ranah internasional seperti PBB dapat memengaruhi pembuat keputusan dalam membuat sebuah kebijakan. Pembuat keputusan mempertimbangkan kemungkinan adanya tekanan dari organisasi internasional. Disisi lainnya, “kebijakan luar negeri suatu negara akan mempengaruhi negara lain di wilayah regional maupun internasional”<sup>34</sup>.

**Grafik 2.1 Faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi *Decision Making***



**Sumber : Kurniawan, Paulus, *Smart Leadership Being A Decision Maker 2*. Hal 1119**

<sup>33</sup> Ibid hal 63

<sup>34</sup> Ibid Hal 23

Gambar diatas menjelaskan bahwa *decision making* digambarkan dengan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi dibuatnya kebijakan luar negeri oleh pembuat keputusan. Analisis terletak pada seberapa jauh sebuah peraturan negara yang dibuat dan dikeluarkan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor internal dari sebuah negara.

#### A. Model *Decision Making*

Dalam *decision making*, terdapat beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang proses pengambilan keputusan yaitu :

- a) “Siapa aktor dalam negara pembuat keputusan politik tersebut?”
- b) “Apakah sebuah keputusan yang dibuat tersebut rasional atau malah sebaliknya?”
- c) “Apakah akibat yang akan terjadi pada system politik nasional maupun internasional jika keputusan tersebut tetap dibuat?”<sup>35</sup>.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dilihat dari faktor faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Pembuat keputusan akan dihadapkan dengan faktor internal dan eksternal dan mempertimbangkan keputusan dalam membuat kebijakan yang paling tepat. Dalam *decision making* terdapat tiga model dalam proses pengambilan keputusan menurut L. Andi Afinotan<sup>36</sup>, yaitu : *Rational Actor Model*, *The Bounded Rationality Model*, *The Bureaucratic Politics Model*.

##### 1. *Rational Actor Model*.

Titik awal dalam mempelajari proses pengambilan keputusan adalah *rational aktor model*. Dalam model ini, pengambilan keputusan menetapkan tujuan, mengevaluasi kepentingan relatifnya, menghitung biaya dan manfaat dari berbagai tindakan. Misalnya, apakah dengan menekan negara

---

<sup>35</sup>. L.Andy Afinotan.2014.“*Decision Making in International Relations: A theoretical Analysis*”. Canadian social science. Vol. 10, No. 5. Hal 252

<sup>36</sup>Ibid, hal 252.

lawan akan memberikan landasan dalam pembicaraan damai akan berhasil atau malah menjadi boomerang. Setiap keputusan yang diambil memiliki resiko. Beberapa pengambil keputusan relatif menerima resiko sedangkan beberapa lainnya menolak<sup>37</sup>. Pengambilan keputusan yang logis tentunya akan mempertimbangkan tujuan dari sebuah kebijakan luar negeri suatu negara dan untuk menentukan pilihan yang akan diambil serta yang merupakan pilihan prioritas diantara pilihan yang lainnya.

Menurut L. Andi Afinotan bahwa *Rational actor model* dalam proses pengambilan keputusan harus mampu memperkirakan bagaimana hasil serta mempertimbangkan nilai dan manfaat yang dibutuhkan dari semua titik akhir yang dicapai. Maka menurutnya pembuat keputusan akan menghitung nilai yang diinginkan dari semua alternatif, membandingkannya, dan kemudian memilih yang mana alternatif yang paling maksimal *benefit* serta minim *cost*. *Rational actor model* juga mempertimbangkan akibat yang telah serta akan dibuat dan menentukan yang merupakan alternatif terbaik. Namun, tidak hanya mempertimbangkan *cost* dan *benefit* tetapi juga mempertimbangkan hasil yang akan ataupun sudah didapatkan dari pengambilan keputusan tersebut. *Decision making* dalam *rational aktor* juga berkaitan dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah informasi mengenai lingkungan suatu negara, aktor lain didalamnya, ataupun tentang konsekuensi dari tindakan-tindakan lainnya<sup>38</sup>. Hal-hal tersebut menjadikan aktor rasional kembali memikirkan tentang *cost* dan *benefit* yang didapat sebelum keputusan bersifat mutlak.

## 2. *The Bounded Rationality Model.*

Pada model ini peneliti menyimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan ini memberikan solusi dan pendapat dimana memaksimalkan *benefit* akan memungkinkan terjadinya hambatan sehingga hal ini menyebabkan sebuah kekurangan dari model ini. Dalam proses

---

<sup>37</sup> Allison, Graham T., and Philip Zelikow. 1999. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. 2nd ed. Longman, Bernstein, Barton J. Understanding Decisionmaking, U.S. Foreign Policy and the Cuban Missile Crisis. *International Security* 25 (1). Hal 64-134

<sup>38</sup> Ibid hal 253

pengambilan keputusan, pengambil keputusan tidak dapat mempertimbangkan semua alternatif yang ada sehingga dalam proses dibuat sebuah batasan untuk mempersempit pilihann yang lebih sesuai nalar dan menjanjikan. Jika sebuah konsekuensi ataupun akibat yang buruk terjadi dan muncul maka yang harus dilakukan adalah dengan memodifikasi dan mengurangi akibatdari hal tersebut terulang lagi namun dengan level yang berbeda<sup>39</sup>.

### 3. *The Bureaucratic Politics Model.*

Model ini menyatakan bahwa sebuah proses *decision making* disimpulkan oleh berbagai aktor, kelompok, dan pihak yang mempengaruhi antar *stakeholders* tersebut. Pembuat keputusan dari *The Bureaucratic Politics Model* ini merupakan lembaga pemerintah yang terdiri dari dengan tanggung jawab dan tingkat pengaruh yang tidak sama. Menurut Graham T Allison disimpulkan bahwa berbagai biro dan departemen bersaing untuk mempengaruhi keputusan dalam menggunakan otoritas politiknya. Graham T Allison berpendapat bahwa “pengambilan keputusan model ini merupakan proses dalam mendapatkan kekuasaan pada pemerintahan”. Sehingga menurutnya strategi untuk membangun koalisi antar biro sangat dimungkinkan terjadi didalam model pengambilan keputusan ini. Beliau juga mengatakan bahwa “sistem persekutuan atau koalisi mendapatkan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dikarenakan prosesnya yang sama seperti negara-negara dalam membentuk sebuah koalisi dalam melawan kekuatan yang lebih dominan”<sup>40</sup>.

Model *decision making* dapat digunakan dalam mengungkapkan sikap *decision maker* dalam membuat dan memutuskan sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan di sebuah negara. Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan *Rational Actor model* karena dari model tersebut dapat dilihat bahwa negara merupakan aktor utama rasional dalam pembuatan

---

<sup>39</sup> Allison, Graham T., and Philip Zelikow. 1999. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. 2nd ed. Longman, Bernstein, Barton J. Understanding Decisionmaking, U.S. Foreign Policy and the Cuban Missile Crisis. *International Security* 25 (1). Ibid hal 252-253

<sup>40</sup> Ibid Hal 255

keputusan terutama untuk membuat sebuah peraturan yang diatur dalam Undang-undang. Menurut Graham T. Allison, “keamanan nasional serta kepentingan nasional adalah prinsip dasar dalam menyusun kebijakan yang berakhir dengan pembuatan keputusan”<sup>41</sup>.

Maka, atas dasar pendapat tersebut, peneliti menggunakan model dari *rational actor* yang dapat memberikan keputusan *decision maker*. Melalui model ini juga di analisis dalam mempertimbangkan *cost* dan *benefit* untuk mencapai kepentingan tersebut. Konsep telah dipaparkan sehingga membentuk sebuah pola pikir bahwa sebelum ditetapkan *vision 4.000 peacekeepers* sebagai Peta Jalan, Indonesia telah memiliki partisipasi berupa pasukan volunteer PKO dari DKPBB. Namun, muncul kebijakan *vision 4.000 peacekeepers* sebagai Peta Jalan, Indonesia sebagai *counter* bukan sebagai pelengkap dalam partisipasi PKO.

### 2.3 Kerangka Pikir

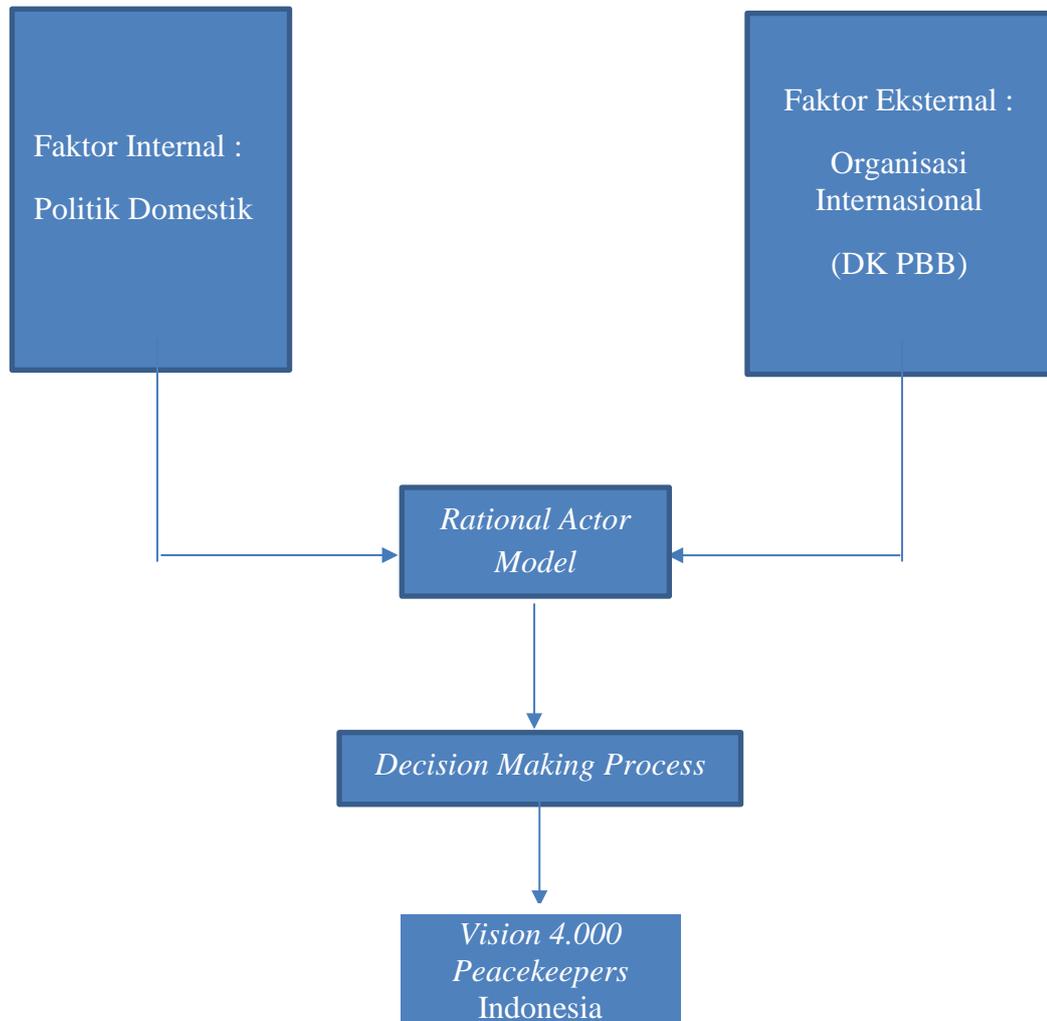
Konflik dan damai merupakan hal yang kerap dibicarakan dalam ilmu hubungan internasional. Peacekeeping operations hadir sebagai instrumen dan melengkapi konflik dan damai di dunia salah satunya di Indonesia. Untuk turut serta menjaga perdamaian di dunia dengan berdasarkan pada UUD 1945 alinea ke 4, Indonesia membuat sebuah peraturan luar negeri yang disebut *roadmap vision 4000 peacekeepers* dengan misi menjadi *top ten* partisipasi pasukan dalam PKO. Dalam membuat peraturan, tentunya Indonesia memiliki alasan pembuatan keputusan. Pada kerangka pemikiran ini, peneliti mendeskripsikan permasalahannya yaitu hadirnya peraturan *vision 4000 peacekeepers* di Indonesia sebagai *counter* bukan sebagai pelengkap. Peneliti juga mendeskripsikan dari konsep yang digunakan yaitu *decision making* serta mengimplementasikannya dengan *rational actor model*. Dari konsep tersebut, terdapat faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan sehingga terbentuklah peraturan *vision 4000 peacekeepers* Indonesia.

---

<sup>41</sup> Ibid Hal 33

Berdasarkan latar belakang dan beberapa sumber data yang diperoleh, maka kerangka pemikiran yang dianalisis oleh peneliti terangkum dalam gambar sebagai berikut :

**Gambar 2.1 : Model Pemikiran Penelitian**



**Sumber : Hasil Kelola Data peneliti**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis dalam metode Penelitian Hubungan Internasional, yang menggambarkan serta menjelaskan peristiwa ataupun kejadian yang terjadi saat ini. Penelitian kualitatif dimaksud adalah pendekatan yang memahami dan mengeksplorasi aspek-aspek bersangkutan antar individu maupun kelompok yang berkaitan dengan permasalahan yang menimbulkan pertanyaan<sup>42</sup>. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memetakan masalah yang terjadi mengenai Penyebab Terbentuknya Peraturan *Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers* tahun 2015-2019 pada *United Nation Peacekeeping Operations* (UNPKO). Data yang dikumpulkan untuk membantu penelitian ini adalah terkait dengan Teori *Decision Making* dalam hal partisipasi *peacekeeping operations* yang berbentuk data dan dokumen lain sehingga peneliti dapat menganalisis arti dan makna dari data informasi yang telah di peroleh.

---

<sup>42</sup> Creswell, John W. 2009. *Research Design : Qualitative, Quantitative, And Mixed Methode Approaches*. Hal 13

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengungkapkan penyebab terbentuknya peraturan *Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers* tahun 2015-2019 pada *United Nation Peacekeeping Operations* (UNPKO) di Indonesia yang dilihat melalui teori *Decision Making* yang mempengaruhi kondisi PKO sehingga terbentuknya *vision 4.000 peacekeeping*. Periode pemilihan batasan waktu dalam penelitian ini adalah tahun 2015 sampai 2019 karena jangka waktu tersebut Indonesia telah memutuskan untuk mengesahkan peraturan tentang *vision 4.000 peacekeepers*. Pada akhirnya, penelitian ini berfokus pada penyebab Indonesia membentuk *vision 4.000 peacekeepers* yang hadir dianggap tidak cukup dan menjadi alasan terbentuknya peta jalan tersebut. Sebelum ditetapkannya *vision 4.000 peacekeepers* sebagai peta jalan, Indonesia telah memiliki partisipasi berupa pasukan volunteer PKO dari DKPBB. Namun, muncul kebijakan *vision 4.000 peacekeepers* menjadi sebuah *roadmap* Indonesia sebagai *counter* bukan sebagai pelengkap dalam partisipasi PKO.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Yaitu berupa jurnal dari penelitian-penelitian terdahulu dan website yang berhubungan dengan fokus dalam penelitian peneliti. Sumber literasi atau buku yang digunakan oleh peneliti adalah jurnal atau penelitian terdahulu yang membahas tentang *vision 4.000 peacekeepers* Indonesia dalam PKO, website yang dapat dijadikan data yang berhubungan dengan tema yang sedang diteliti dan buku yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara teori, konsep dan permasalahan yang diteliti. Kajian pustaka juga diperoleh dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan *vision 4.000 pecekeepers* di Indonesia. Data PKO dapat diperoleh dari mengkaji sumber-sumber data yang berasal dari dokumen-dokumen, buku, pencarian internet, jurnal dan berbagai website resmi seperti : *peacekeeping.un.org*, *kemlu.go.id*, serta portal elektronik lainnya yang mendukung penelitian ini.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yang telah tersedia yang menggambarkan berbagai penelitian untuk diteliti. Data tersebut merupakan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain maupun pemerintahan dalam pembuktian pertanyaan penelitian<sup>43</sup>. Analisis data dalam penelitian adalah Teknik analisis Creswell mulai dari pengumpulan data, interpretasi data, dan menggabungkan data dengan konsep yang sudah ditentukan oleh peneliti<sup>44</sup>. Kemudian terakhir menyimpulkan. Analisis data ini didapat dalam bentuk dokumen resmi pemerintahan RI mengenai konsep *decision making* dan *rational actor model*, data-data yang diperoleh mengenai penelitian ini didapat dari berita-berita ataupun artikel terkait penelitian dan laporan-laporan serta dokumen terpercaya yang menjawab penelitian.

---

<sup>43</sup> Moleong, Lexy. J, 2018 *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya hal 95-102

<sup>44</sup> Creswell, John W. 2009. *Research Design : Qualitative, Quantitative, And Mixed Methode Approaches edition 3th*. University of Michigan Ann Arbor, United States. Hal 13

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Konflik selalu muncul baik dalam wilayah global maupun regional. DK PBB muncul sebagai sebuah organisasi yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Melalui UNPKO, setiap negara wajib berpartisipasi dalam mengirimkan pasukannya ke berbagai negara-negara yang terkena konflik salah satunya adalah Indonesia. Dengan berlandaskan pada UUD 1945 alinea ke 4, Indonesia mengirimkan pasukannya dalam misi perdamaian dunia PKO. Pada tahun 2014, untuk meningkatkan jumlah kontribusi dalam pasukan perdamaian, Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan yang disebut sebagai *roadmap vision 4.000 peacekeepers* Indonesia. Peraturan tersebut memiliki misi yaitu menjadi 10 negara penyumbang pasukan terbanyak dunia serta mengirimkan pasukan sejumlah 4.000 ke dalam misi-misi yang tersebar di UNPKO. Namun, peraturan tersebut hanya berlaku pada tahun 2015-2019. Di akhir tahun peraturan tersebut berlaku, Indonesia tidak mencapai jumlah pasukan seperti yang ditargetkan, namun berhasil menduduki peringkat 8 dunia dan memasuki 10 negara penyumbang pasukan terbanyak.

Analisis konsep rational actor model menjelaskan bahwa Indonesia dalam mengirimkan pasukannya memiliki perencanaan yang matang. Bermula dari kontribusi pasukan terbanyak Indonesia yaitu ke wilayah Lebanon, UNIFIL. Tentunya wilayah tersebut merupakan wilayah konflik dengan fasilitas terbaik dalam hal mobilitas, sumber daya, dan medan konfliknya. Pemerintahan Indonesia tidak akan mengambil resiko yang berlebihan dalam pengiriman pasukannya namun tetap berkontribusi sesuai dengan misi PKO yang berlaku.

Menurut peneliti, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia dan berperan aktif menjaga perdamaian tidak hanya didasari oleh UUD 1945. Namun dalam penelitian ini terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan peraturan tersebut. Dalam penelitian ini faktor internalnya berupa politik domestik berupa UUD 1945. Politik domestic yang dimaksud yaitu arah kebijakan oleh dua pemimpin yang berbeda yaitu era pemerintahan SBY dan Jokowi. *Roadmap* dibentuk dan dirancang pada tahun 2012 dimana tahun tersebut merupakan tahun pemerintahan presiden SBY, namun di sahkan pada tahun 2015 yang merupakan tahun pemerintahan era presiden Jokowi. Maka menurut peneliti, arah kebijakan politik domestic diantara 2 pemimpin negara tersebut berbeda sehingga roadmap dijalankan dan diresmikan atas dasar warisan kebijakan lalu oleh kepala negara yang berbeda.

Sedangkan faktor eksternalnya adalah hubungan negara-negara dengan sistem internasional dengan negara sebagai sebuah aktor yaitu DK PBB sebagai sebuah organisasi internasional yang memfasilitasi Indonesia. Faktor faktor tersebut memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan dibuatnya peraturan *roadmap vision peacekeepers* Indonesia sebagai sebuah peta jalan. Tetapi, jumlah partisipasi yang banyak tidak secara otomatis mengubah Indonesia menjadi aktor berpengaruh dalam pemeliharaan PBB. Indonesia lebih memilih mendapatkan citra baik dari dalam ranah internasional khususnya dalam bidang perdamaian sehingga dapat memungkinkan Indonesia untuk mewujudkan visi dan langkah kedepannya. Dari faktor internal dan eksternal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Indonesia berkomitmen dalam mengirimkan pasukan dan pembuat peraturan resmi *vision 4000 peacekeepers* bukan semata karena dilandasi dengan UUD 1945 namun mempunyai tujuan dibalik itu semua yaitu citra positif yang didapatkan dari pandangan internasional.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pemaparan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran yang dapat dimanfaatkan, sebagai berikut :

1. Kepada akademisi kedepannya diperlukan penelitian lebih lanjut tentang perbandingan arah kebijakan politik domestik Indonesia di era pemerintahan SBY dan Jokowi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendalami serta menggupas konsistensi dari komitmen Indonesia dalam misi perdamaian dunia PBB khususnya setelah berakhir *roadmap vision 4000 peacekeepers*.
3. Dikarenakan Indonesia telah menjadi keanggotaan tidak tetap di DK PBB tahun 2019-2020, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperdalam analisis mengenai kontribusi Indonesia terhadap isu-isu *peacekeeping* terutama dalam aspek keselamatan dan keamanan personel pasukan serta peningkatan peran *peacekeepers* perempuan Indonesia dalam misi perdamaian dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ade Mamam Suherman, *Organisasi Internasional Dan Integritas Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum Dan Globalisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, Hal 23
- Creswell, John W. *Research Design : Qualitative, Quantitative, And Mixed Methode Approaches*. 2009. Hal 13
- Dr. Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik teorir, konsep, dan aplikasi pada era media baru*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2016, hal 140
- Kurniawan, Paulus., Made Kembar Sri Budhi. *Smart Leadership Being A Decision Maker #2 Hal-Hal Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Seorang Pemimpin Dalam Mengambil Keputusan*. Yogyakarta. Penerbit Andi. 2017. Hal 1121.
- Meyer, Thomas. *Peran partai politik dalam sebuah sistem demokrasi : Sembilan tesis*. Jakarta. Friedrich ebert stiftung (FES). Hal 35
- Moleong, Lexy.J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moh. Kusnardi., Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, 1988, Hal 65

## JURNAL

Allison, Graham T., and Philip Zelikow. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. 2nd ed. Longman, 1999. Bernstein, Barton J. *Understanding Decisionmaking, U.S. Foreign Policy and the Cuban Missile Crisis*. *International Security* 25 (1), 2000: 134–64

Bab VII piagam PBB.

Bojang, AS, 2018. "The Study Of Foreign Policy In International Relations". Ege University. Izmir Turkey. *Vol 6. Issue 4*.

Dwi Apriyanti, Yossi . 2020. "Kebijakan Indonesia Mengeluarkan *Roadmap Vision 4000 Peacekeepers 2015-2019* Pada UN-PKO (UNITED NATION PEACEKEEPING OPERATION)" Universitas Riau.

Fauzia, Aisha. 2018. "Understanding Motivations behind States' Participations to the UN Peacekeeping Operations : A Case Study of Indonesia" Master of Science International Relations and Diplomacy. Leident University.

Hutabarat, Leonard F. 2016. "Diplomasi Indonesia Dalam Pemeliharaan Perdamaian PBB". Kementerian Luar Negeri. *Jurnal Pertahanan Volume 6 Nomor 2*.

Jervis, Robert. 2017. *Perception And Misperception In International Politics New Edition*. New Jersey. Princeton University Press Princeton And Oxford. Hal 172.

Kafarneh, Dr. Ahmed Aref Al. *Decision-Making In Foreign Policy*. Jordan. Al-Balqa Applied University, Ajloun University College, Basic Science Department, 2013. Hal 65. *Journal Of Law, Policy And Globalization* Www.iiste.Org ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.10, 2013.

L.Andy Afinotan.2014."Decision Making in International Relations: A theoretical Analysis". *Canadian social science*. Vol. 10, No. 5. Hal 252.

Maydi Aulia Riski, *Teori Falsifikasi Karl Raimund Popper : Urgensi Pemikirannya dalam Dunia Akademik*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 4 No 3 Tahun 2021.

- Murwanto, Ilham Pradana Adinegoro. Mohamad Rosyidin, Rr. Hermi Susiatiningsih, dan Satwika Paramasatya. 2020. "Indonesia's Commitment To The United Nations Peacekeeping Operations In Constructivist Perspective : Case Study Of Roadmap Vision 4.000 Peacekeepers 2015-2019 Policy". *Jurnal Pertahanan Vol .6 No. 3 . 2020. Pp. 342-354.*
- Pramudya, Dylan. 2021. "Development of the Indonesian National Army Peacekeeping Mission Center as a Center Of Peacekeeping Training in Southeast Asia". Universitas Pertahanan. *Volume 7, Nomor 1.*
- Simon, Herbert A. *Administrative Behavior : A Study Of Decision Making Processes In Administrative Organization.* The Oxford Handbook Of Classics In Public Policy And Administration. Hal 2-11. Dalam Oxford Handbooks Online (Www.Oxfordhandbooks.Com). Oxford University Press, 2018. All Rights Reserved. Under The Terms Of The Licence Agreement, An Individual User May Print Out A PDF Of A Single Chapter Of A Title In Oxford Handbooks Online For Personal Use (For Details See Privacy Policy And Legal Notice).
- Snyder, R., H. W. Bruck and B. Sapin. 1954. *Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics.* Princeton: Princeton University Press. Dalam tulisan Aneek Chatterjee. *International Relations Today Concepts And Applications .* Department Of Political Science Presidency Collage, Kolkata. Delhi Chennai Chandigarh. Hal 81- 83
- Stein, Janice Gross. Psychological Explanations of International Conflict. In Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, and Beth A. Simmons, eds. *Handbook of International Relations.* Sage, 2002, pp. 292–308. Snyder, Richard C., H. W. Bruck, and Burton Sapin. *Foreign Policy Decision Making (Revisited).* Palgrave, 2002.

## **WEBSITE**

### **Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Kerjasama Internasional**

[https://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/migrasi//Produk/Pengerahan\\_Pasukan.pdf](https://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/migrasi//Produk/Pengerahan_Pasukan.pdf)

Diakses pada Kamis, 25 November 2021 pukul 03.35 WIB

### **East Asia Forum**

Nicole Jenne, 2009, *Indonesia must look beyond peacekeeping to impress at the UN*, Pontificia Universidad Católica de Chile

<https://www.eastasiaforum.org/2019/02/23/indonesia-must-look-beyond-peacekeeping-to-impress-at-the-un/>

Diakses pada 7 Desember 2021/ pukul 04.05 WIB

### **Indonesia Dan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia Pbb**

[https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman\\_list\\_lainnya/indonesia-danmisi-pemeliharaan-perdamaian-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-danmisi-pemeliharaan-perdamaian-pbb)

Diakses pada 8 Desember 2021, pukul 08. 03 WIB.

### **Kamus Besar Bahasa Indonesia Tentang Prestise**

<https://kbbi.web.id/prestise>.

Diakses pada 2 Januari 2021, pukul 10.08 WIB.

## **KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI**

[Kemlu.go.id](http://Kemlu.go.id)

Diakses pada 5 Desember 2021, pukul 01.24 WIB

### **Past Peacekeeping Operation**

<https://peacekeeping.un.org/en/past-peacekeeping-operations>

Diakses pada 5 Desember 2021, pukul 22.25 WIB.

### **Peacekeeping Operations**

Summary Of Contributions To UN Peacekeeping By Country, Mission And Post. Police, UN Military Experts On Mission , Staff Officers And Troops.

Diakses pada 20 November 2021, pukul 03.30 WIB.

### **Permenlu Tahun 2020 Tentang Vision Peacekeepers**

<https://backpanel.kemlu.go.id/Shared%20Documents/Permenlu%20No.%201%20Tahun%202017%20tentang%20Road%20Map%20Vision%204.000%20Peacekeepers%202015-2019.pdf>.

Diakses pada 5 Desember 2020, pukul 01.56 WIB.

### **Piagam Jakarta**

[https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta\\_charter\\_bahasa.pdf](https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/jakarta_charter_bahasa.pdf)

Diakses pada 18 Desember 2020, pukul 00.14 WIB.

### **Ranking of military and police contributions to UN operations**

<https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>.

Diakses pada 5 Desember 2021. Pada pukul 22.30 WIB

### **Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia. Kerjasama ASEAN. Pilar Politik dan Keamanan. ADMM (*ASEAN Deference Ministers Meeting*).**

JOM FISIP Vol. 7: &: Edisi II Juli-Desember 2020

Diakses pada 6 Desember 2021, pukul 00.24 WIB

### **Troop And Police Contributors**

<https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>.

Diakses pada 5 Desember 2020, pukul 22.30 WIB.

### **What Is Peacekeeping**

<https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping>,

Diakses pada 31 Maret 2021, pukul 02.06 WIB.